

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010-2019

Silvia Karenina, Krisna Dwi Andayani, Imanuel Andre Aditya, Mohammad Wasil



Silvia Karenina¹, Krisna Dwi Andayani², Imanuel Andre Aditya³, Mohammad Wasil⁴; ^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran, Jawa Timur, ² Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya, Jawa Timur.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2021-01-08

Received in revised form 2021-01-12

Accepted 2021-02-20

Kata kunci:

Pendapatan Asli Daerah,
Tingkat Kemandirian
Daerah, Pertumbuhan
Ekonomi.

Keywords:

Regional Native Income,
Regional Independence Level,
Economic Growth.

How to cite item:

Silvia Karenina, Krisna
Dwi Andayani, Imanuel
Andre Aditya, Mohammad
Wasil. (2021). Tingkat
Kemandirian Keuangan
Daerah dan Implikasinya
Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2010-
2019.

*Journal of Regional
Economics Indonesia*, 2(1).

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bojonegoro dan hubungannya dengan tingkat kemandirian keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Bojonegoro memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang sangat rendah sehingga dapat dikatakan tidak dapat melaksanakan otonomi daerah. Selain itu terdapat hubungan yang negatif dan tidak signifikan antara rasio untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Abstract

The purpose of this research is to analyze, the level of financial independence of Bojonegoro Regency and the relationship of financial independence level with economic growth in 2009-2019. The results showed that Bojonegoro Regency has a very low level of regional financial independence so that it can be said that it cannot implement regional autonomy. Furthermore, there is a negative and insignificant relationship between the Ratio to measure the level of regional financial independence to economic growth.

1. Pendahuluan

Desentralisasi atau otonomi daerah memiliki arti umum sebagai pelimpahan wewenang pusat ke level pemerintahan yang berada di bawahnya. Otonomi daerah merupakan cara pemerintah daerah sepenuhnya dapat mengelola sumber daya daerahnya sendiri dengan lebih maksimal (Prakoso, Islami, & Sugiharti, 2019). Otonomi daerah dijadikan dasar untuk melakukan pembangunan daerah secara mandiri dengan menggunakan sumber daya dan potensi daerah itu sendiri. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut melimpahkan kepada pemerintah daerah berupa kewenangan lebih besar untuk melakukan perencanaan pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran dalam mengelola rumah tangganya serta mampu untuk membiayai operasional rumah tangga tersebut secara mandiri. Tetapi, konsekuensi yang dihadapi pemerintah daerah untuk mendapatkan hasil yang maksimal harus diiringi dengan bekerja lebih keras agar mampu menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah yang optimal.

Peraturan tersebut mengakibatkan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, terutama dalam mengelola keuangan daerah. Adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat sumber-sumber penerimaan keuangan yang dikelola daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah seperti yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan ataupun penerimaan lain-lain harus dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah sebagai pengelola keuangan harus menerapkan prinsip efektifitas serta efisiensi dalam penggunaan dananya.

Kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dinilai dari besar kecilnya PAD yang diperoleh daerah itu sendiri. Bisa dikatakan bahwa PAD merupakan indikator penting dalam menentukan tingkat ketergantungan suatu daerah. Semakin besar PAD, maka akan semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber-sumber penerimaan lain. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD), sumber-sumber pembangunan pelaksana desentralisasi terdiri atas PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Salah satu indikator untuk meningkatkan PAD adalah sumber daya manusianya. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait dengan kualitas yang masih rendah, kemajuan teknologi serta informasi lebih cepat daripada kemajuan sumber daya yang ada. Akibatnya, banyak daerah yang tidak menunjukkan perkembangan perekonomian secara signifikan. Keterbatasan sumber dana juga menjadi kendala pelaksanaan pembangunan daerah dimana akan membuat adanya ketimpangan antar masing-masing daerah kabupaten atau kota, dimana daerah yang memiliki dana pembangunan besar dan ada juga daerah yang memiliki sumber dana yang kecil.

Pelaksanaan pembangunan daerah harus terus ditingkatkan karena salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah yakni bisa dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi (Karun, Mintarti, & Juliansyah 2012). Tinggi rendahnya laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menunjukkan adanya perubahan pada kesejahteraan ekonomi masyarakatnya (Putra & Hidayat, 2016). Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari tahun ke tahun pada periode tertentu menunjukkan adanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat pula, begitupun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi juga digunakan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan selanjutnya di pemerintahan yang akan datang apakah kebijakan tersebut perlu dilanjutkan atau perlu diperbaiki sehubungan dengan peran pemerintahan dalam perekonomian.

Peran pemerintahan dalam kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam mencukupi kegiatan pemerintahan. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan pendapatan yang berasal dari sumber lainnya seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu meningkatkan investasi belanja modal sehingga kualitas pelayanan publik bisa semakin baik. Tetapi kenyataan yang terjadi adanya peningkatan PAD justru tidak diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal. Hal ini bisa terjadi karena PAD banyak digunakan untuk membiayai kegiatan belanja lainnya. Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah yakni Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Sedangkan bantuan pemerintah pusat antara lain penerimaan dana alokasi umum, dana alokasi khusus dari otonomi khusus dan juga pinjaman.

Kemandirian daerah menggambarkan bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti halnya pajak dan retribusi daerah dan lain-lain, pembangunan daerah bisa terwujud jika disertai dengan kemandirian daerah yang dilakukan secara efektif. Yang berarti pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya. Selama ini pemerintah daerah juga masih bergantung pada pemerintah pusat dalam mendukung pendanaan pembangunan. Kemampuan daerah untuk melaksanakan pembangunan dengan kemampuannya sendiri belumlah sampai pada tahap mandiri secara keuangan. Untuk pembangunan dalam skala besar masih bergantung pada dukungan transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan latar belakang ini peneliti ingin meneliti mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro.

2. Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sistematis dan telah diolah dan dipublikasikan. Penelitian ini dikumpulkan dari berbagai instansi dan lembaga yang ada kaitan dengan penelitian. Instansi dan lembaga tersebut antara lain adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), jurnal-jurnal dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Sementara untuk data pertumbuhan ekonomi yaitu tentang pertumbuhan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta dari berbagai instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Untuk menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, digunakan rumus sebagai berikut:

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan. Derajat desentralisasi fiskal, khususnya komponen PAD akan dibandingkan dengan TPD, dengan menggunakan skala interval sebagai berikut:

Tabel 01. Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi (%)	Kemandirian
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.237.1996

Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Formula rasio kemandirian menurut (Mahmudi, 2010) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 02. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Derajat Desentralisasi (%)	Kemandirian
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% -100%	Delegatif

Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

c. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas PAD menurut (Mahmudi, 2010) adalah :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

d. Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menganalisis hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan pertumbuhan ekonomi, digunakan alat uji korelasi sederhana pearson. Korelasi pearson, diformulasikan sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{(n \sum x_i^2) - (\sum x_i)^2} \sqrt{(n \sum y_i^2) - (\sum y_i)^2}}$$

Dimana:

r_{xy} = nilai korelasi antara x_i dan y_i

n = jumlah periode

x_i = kemandirian keuangan

y = pertumbuhan ekonomi

Besarnya koefisien korelasi (r) antara dua buah variabel (y dan x) adalah nol sampai ± 1 . Apabila dua buah variabel (x dan y) mempunyai nilai $r = 0$ berarti variabel- variabel tersebut tidak ada hubungan. Apabila variabel-variabel itu mempunyai $r = \pm 1$, maka kedua variabel tersebut tidak mempunyai hubungan yang sempurna. Adapun interpretasi tingkat keeratan hubungan antara variabel x dan y (variabel bebas dan terikat), digunakan tabel interpretasi koefisien korelasi (Sugiyono, 2011) sebagai berikut:

Tabel 03. Koefisien Relasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,00	Sangat Kuat

3. Hasil dan Pembahasan

A. Perkembangan PAD

Pada Tabel 01, PAD Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2009–2018 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dengan rata-rata mengalami perkembangan PAD sebesar 22,86% pertahunnya. Lebih lanjut, pada tahun 2012 mengalami perkembangan PAD yang sangat besar yaitu sebesar 45,65% disusul kemudian pada tahun 2013 yang mengalami perkembangan sebesar 44,42%. Kenaikan terbesar pada tahun 2012 terjadi karena Pajak Daerah mengalami kenaikan 21,93% dari tahun sebelumnya, Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar 83,77% dari tahun sebelumnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan sebesar 130,64% dan Lain-lain PAD yang sah

mengalami kenaikan sebesar 20,45%. Sedangkan perkembangan paling kecil terjadi pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2014 yang mengalami perkembangan hanya sebesar 0,04% dikarenakan hanya Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah yang mengalami kenaikan.

Tabel 04. Perkembangan PAD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 - 2018

Tahun	PAD	%
2009	Rp61.728.540.000	-
2010	Rp73.200.000.001	18,58%
2011	Rp93.164.433.001	27,27%
2012	Rp135.696.733.955	45,65%
2013	Rp195.973.047.818	44,42%
2014	Rp196.055.495.187	0,04%
2015	Rp262.951.689.270	34,12%
2016	Rp290.865.096.992	10,62%
2017	Rp329.003.732.182	13,11%
2018	Rp368.155.780.017	11,90%
Rata-Rata	Rp200.679.454.842	22,86%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

B. Analisis Kemandirian Keuangan

Untuk mengukur bagaimana kinerja pemerintah daerah, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, yaitu: (1) Rasio derajat desentralisasi fiskal; (2) Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah (3) Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah; dan (4) Rasio Efektivitas PAD.

C. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Terlihat pada Tabel 05, Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2009 - 2018 memiliki rata-rata rasio Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar 8,65% yang artinya kemampuan fiskal dinyatakan sangat kurang dengan demikian kinerja anggaran tidak berjalan baik. Terlihat pada tahun 2005 yang mempunyai rasio derajat desentralisasi fiskal paling rendah dibandingkan tahun lainnya yaitu sebesar 6,52%. Derajat desentralisasi fiskal paling besar sendiri ada pada tahun 2018 yaitu sebesar 10,87% meningkat hanya 0,04% dibanding tahun sebelumnya namun nilai ini masih menyatakan bahwa kemampuan keuangan/fiskal masih kurang. Hal ini terjadi salah satunya karena kemampuan daerah untuk menghasilkan PAD sendiri

belum bisa maksimal.

**Tabel 05. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2009 - 2018**

Tahun	PAD	Total Penerimaan	Rasio DDF	Keterangan
2009	Rp61.728.540.000	Rp947.009.150.000	6,52%	SANGAT KURANG
2010	Rp73.200.000.001	Rp1.019.791.232.876	7,18%	SANGAT KURANG
2011	Rp93.164.433.001	Rp1.333.736.124.265	6,99%	SANGAT KURANG
2012	Rp135.696.733.955	Rp1.537.693.598.746	8,82%	SANGAT KURANG
2013	Rp195.973.047.818	Rp1.924.414.892.512	10,18%	KURANG
2014	Rp196.055.495.187	Rp2.305.749.144.239	8,50%	SANGAT KURANG
2015	Rp262.951.689.270	Rp2.946.124.632.270	8,93%	SANGAT KURANG
2016	Rp290.865.096.992	Rp3.799.272.843.895	7,66%	SANGAT KURANG
2017	Rp329.003.732.182	Rp3.036.888.070.374	10,83%	KURANG
2018	Rp368.155.780.017	Rp3.385.914.477.856	10,87%	KURANG
Rata-Rata	Rp200.679.454.842	Rp2.223.659.416.703	8,65%	SANGAT KURANG

Sumber data: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

D. Rasio Ketergantungan Keuangan

Pada Tabel 06, Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2009-2018 memiliki rata-rata tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi yaitu sebesar 75,31% dengan tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 87,64% dan paling rendah pada tahun 2018 yaitu sebesar 66,08%. Angka-angka ini mengartikan bahwa semakin tinggi nilai rasio maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana ekstern, dalam hal ini adalah dana transfer. Terlihat pula pada setiap tahunnya cenderung menurun. Hal ini mengartikan bahwa Kabupaten Bojonegoro sangat bergantung terhadap dana transfer dari pusat untuk membiayai kebutuhan daerahnya.

Tabel 06. Rasio Ketergantungan Keuangan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009–2018

Tahun	Dana Perimbangan	Total Penerimaan	Rasio Ketergantungan	Keterangan
2009	Rp829.927.400.000	Rp947.009.150.000	87,64%	SANGAT TINGGI
2010	Rp847.688.214.908	Rp1.019.791.232.876	83,12%	SANGAT TINGGI
2011	Rp1.009.423.206.718	Rp1.333.736.124.265	75,68%	SANGAT TINGGI
2012	Rp1.195.907.170.000	Rp1.537.693.598.746	77,77%	SANGAT TINGGI
2013	Rp1.467.842.830.000	Rp1.924.414.892.512	76,27%	SANGAT TINGGI
2014	Rp1.717.167.170.000	Rp2.305.749.144.239	74,47%	SANGAT TINGGI
2015	Rp2.144.453.570.000	Rp2.946.124.632.270	72,79%	SANGAT TINGGI
2016	Rp2.750.148.976.272	Rp3.799.272.843.895	72,39%	SANGAT TINGGI
2017	Rp2.031.786.140.050	Rp3.036.888.070.374	66,90%	SANGAT TINGGI
2018	Rp2.237.436.083.394	Rp3.385.914.477.856	66,08%	SANGAT TINGGI
Rata-Rata	Rp1.623.178.076.134	Rp2.223.659.416.703	75,31%	SANGAT TINGGI

Sumber data: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

E. Rasio Kemandirian Keuangan

Pada Tabel 07, Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2009–2018 memiliki rata-rata rasio kemandirian keuangan 11,69%. Dapat terlihat bahwa pada setiap tahunnya nilai rasio tidak bisa menembus angka diatas 20%. Nilai rasio paling rendah terdapat pada tahun 2009 dengan nilai sebesar 7,44% dengan keterangan rendah sekali/instruktif lalu nilai rasio paling tinggi terdapat pada tahun 2018 yaitu sebesar 11,69% dan masih masuk dalam kategori rendah sekali/instruktif. Dapat disimpulkan Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2009–2018 memiliki tingkat kemandirian keuangan sangat rendah sekali dan masih mengandalkan dana transfer dari pusat dengan keterangan rendah sekali/ instruktif atau dapat diartikan memiliki pola hubungan dimana pemerintah pusat memiliki peran lebih dominan dibandingkan pemerintah daerah sehingga dikatakan daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.

**Tabel 07. Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Bojonegoro Tahun
2009 – 2018**

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Rasio Kemandirian	Keterangan
2009	Rp61.728.540.000	Rp829.927.400.000	7,44%	RENDAH SEKALI/INSTRUKTIF
2010	Rp73.200.000.001	Rp847.688.214.908	8,64%	RENDAH SEKALI/INSTRUKTIF
2011	Rp93.164.433.001	Rp1.009.423.206.718	9,23%	RENDAH SEKALI/INSTRUKTIF
2012	Rp135.696.733.955	Rp1.195.907.170.000	11,35%	RENDAH SEKALI/INSTRUKTIF
2013	Rp195.973.047.818	Rp1.467.842.830.000	13,35%	RENDAH SEKALI/INSTRUKTIF
2014	Rp196.055.495.187	Rp1.717.167.170.000	11,42%	RENDAH SEKALI/INSTRUKTIF
2015	Rp262.951.689.270	Rp2.144.453.570.000	12,26%	RENDAH SEKALI/INSTRUKTIF
2016	Rp290.865.096.992	Rp2.750.148.976.272	10,58%	RENDAH SEKALI/INSTRUKTIF
2017	Rp329.003.732.182	Rp2.031.786.140.050	16,19%	RENDAH SEKALI/INSTRUKTIF
2018	Rp368.155.780.017	Rp2.237.436.083.394	16,45%	RENDAH SEKALI/INSTRUKTIF
Rata- Rata	Rp200.679.454.842	Rp1.623.178.076.134	11,69%	RENDAH SEKALI/INSTRUKTIF

Sumber data: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

F. Rasio Efektivitas PAD

Pada Tabel 08, Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2009–2018 memiliki rata-rata tingkat efisiensi PAD sebesar 127,28% tiap tahunnya. Dapat terlihat bahwa pada tahun 2010 memiliki nilai efektivitas PAD paling kecil yaitu sebesar 109,14% namun angka ini lebih dari 100% yang berarti PAD sudah efektif. Angka terbesar berada pada tahun 2012 dengan nilai sebesar 176,66% yang mengartikan bahwa sudah sangat efektif. Dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2009–2018 memiliki PAD yang sangat efektif mengingat setiap tahunnya angkanya lebih dari 100%.

Tabel 08. Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009-2018

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	%	Keterangan
2009	Rp61.728.540.000	Rp70.233.940.000	113,78%	EFEKTIF
2010	Rp73.200.000.001	Rp79.891.483.832	109,14%	EFEKTIF
2011	Rp93.164.433.001	Rp164.585.991.461	176,66%	EFEKTIF
2012	Rp135.696.733.955	Rp159.247.616.977	117,36%	EFEKTIF
2013	Rp195.973.047.818	Rp215.766.157.633	110,10%	EFEKTIF
2014	Rp196.055.495.187	Rp291.244.903.352	148,55%	EFEKTIF
2015	Rp262.951.689.270	Rp337.695.825.018	128,43%	EFEKTIF
2016	Rp290.865.096.992	Rp340.408.041.197	117,03%	EFEKTIF
2017	Rp329.003.732.182	Rp448.188.138.725	136,23%	EFEKTIF
2018	Rp368.155.780.017	Rp425.167.970.431	115,49%	EFEKTIF
Rata-Rata	Rp200.679.454.842	Rp253.243.006.863	127,28%	EFEKTIF

Sumber data: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

G. Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro

Dapat terlihat dari hasil output analisis pembahasan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDDF) Kabupaten Bojonegoro tahun 2009-2018 terhadap Pertumbuhan Ekonominya memiliki hubungan yang negative dengan tingkat korelasi lemah yaitu sebesar -0,311 dengan nilai Sig. sebesar 0,381 yang berarti $> 0,05$ maka dinyatakan tidak signifikan.

Pada Rasio Ketergantungan Daerah (RKTGD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2009-2018 terhadap Pertumbuhan Ekonomi menghasilkan nilai -0,131 yang berarti memiliki hubungan yang negative dengan tingkat korelasi sangat lemah. Pada nilai Sig. yang menghasilkan angka 0,719 yang berarti lebih besar dari 0,05 menyatakan bahwa tidak signifikan.

Hasil output Rasio Kemandirian Daerah (RKMD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2009-2018 terhadap Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai sebesar -0,912 yang artinya memiliki hubungan yang negative atau berlawanan dengan tingkat korelasi yang sangat lemah. Nilai Sig. yang menghasilkan angka 0,596 yang berarti angka ini lebih besar dari 0,05 membuat tidak signifikan.

Terakhir, pada Rasio Efektivitas PAD (REFPAD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2009-2018 terhadap Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai korelasi pearson sebesar -0,97 yang artinya memiliki hubungan yang negative dengan tingkat korelasi sangat lemah. Pada nilai Sig. yang

menghasilkan angka sebesar 0,791 yang artinya $> 0,05$ menyatakan bahwa tidak signifikan.

Dapat disimpulkan dari keseluruhan hasil korelasi pearson pada tabel di atas bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki hubungan yang negative dengan tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bojonegoro 2009-2018 dikarenakan dari keseluruhan nilai korelasi menyatakan memiliki hubungan yang negative terhadap Pertumbuhan EKonomi dan tidak memiliki hubungan yang signifikan.

Tabel 09. Korelasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 - 2018
Correlations

		RDDF	RKTGD	RKMD	REFPAD	PEKO
RDDF	Pearson Correlation	1	-.775**	.978**	-.177	-.311
	Sig. (2-tailed)		.008	.000	.625	.381
	N	10	10	10	10	10
RKTGD	Pearson Correlation	-.775**	1	-.877**	-.227	-.131
	Sig. (2-tailed)	.008		.001	.529	.719
	N	10	10	10	10	10
RKMD	Pearson Correlation	.978**	-.877**	1	-.075	-.192
	Sig. (2-tailed)	.000	.001		.836	.596
	N	10	10	10	10	10
REFPAD	Pearson Correlation	-.177	-.227	-.075	1	-.097
	Sig. (2-tailed)	.625	.529	.836		.791
	N	10	10	10	10	10
PEKO	Pearson Correlation	-.311	-.131	-.192	-.097	1
	Sig. (2-tailed)	.381	.719	.596	.791	
	N	10	10	10	10	10

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber data: diolah, 2020

4. Penutup

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2009-2018 dapat dikatakan belum optimal dalam melaksanakan otonomi daerah. Hal ini dikarenakan pada perhitungan rasio yang menghasilkan: (i) rasio derajat desentralisasi fiskal memiliki rata-rata sebesar 8,65% yang artinya kemampuan fiskal dinyatakan sangat kurang

sehingga kinerja anggaran tidak berjalan baik; (ii) rasio tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat memiliki rata-rata sangat tinggi yaitu sebesar 75,31%, yang berarti sangat bergantung pada transfer dana pusat; (iii) rasio tingkat kemandirian keuangan memiliki rata-rata sebesar 11,69% yang berarti memiliki pola hubungan instruktif, artinya memiliki pola hubungan dimana pemerintah pusat memiliki peran lebih dominan dibandingkan pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Karun, Leonardo Dakori, Sri Mintarti, & Juliansyah. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10, No. 2, pp. 111.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedu. Yogyakarta.
- Prakoso, Jalu Aji, Fitrah Sari Islami, & Rr. Retno Sugiharti. 2019. Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, Vol. 4, No. 1, pp. 87-100.
- Putra, Rico, & Surya Hidayat. 2016. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi." *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah* Vol. 3, No. 4, pp. 243-56.
- Sugiyono. 2011. *Statistik Nonparametris*. Bandung: Alfabeta.
- Putra, Rico, & Surya Hidayat. 2016. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi." *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, Vol. 3, No. 4, pp. 243-56.
- Ryan Ezkirianto & M. Findi A. 2013. Analisis Keterkaitan Antara Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB Per Kapita di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Vol. 2, No. 1, pp. 8-22.
- Royda, Royda, & Dwi Riana. 2019. Analisis Kemandirian Dan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Akuntansi Dan Manajemen*, Vol. 14, No. 2, pp. 41-50.
- Marlina. 2014. *Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal, Elastisitas, Efisiensi, dan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Aceh.*, Vol. 1, No. 1, pp. 52-58.
- Hardiana, R. Dian, Heraeni Tanuatmodjo, & Fitriana Kurniati. 2020. Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019 (Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Menjelang Dua Dekade Otonomi Daerah di

Indonesia) Indonesia Akan Menyambut Dua Dekade Berjalannya Desentralisasi yang Dijabarkan Administrasi, Politik dan Fiskal. *Mengacu*, Vol. 8, No. 2, pp. 197-210.